

Pemprov Didesak Percepat Realisasi Penambahan Modal Bank Sumut



Pembicara terdiri dari Kepala Divisi Perencanaan PT Bank Sumut Edy Riswan (kiri), Ketua Komisi A DPRD Sumut M. Hanafiah Harahap (kedua kiri) dan pengamat ekonomi Gunawan Benjamin (kedua kanan) dipandu moderator Sarsin Siregar (kanan), memberikan paparan saat diskusi publik di Medan, Kamis (24/1). Diskusi tersebut mengusung tema Mengoptimalkan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Bank Sumut Dalam Memajukan Perekonomian Rakyat Sumatera Utara. (Foto: LintasMedan/Irma)

Medan, 24/1 (LintasMedan) – Kalangan DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat segera merealisasikan penambahan penyertaan modal ke PT Bank Sumut sesuai yang diamanahkan dalam peraturan daerah (Perda).

“Kami berharap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mendorong percepatan penambahan modal Pemprov Sumut ke PT Bank Sumut, karena Perdanya telah disahkan oleh DPRD Sumut pada 20 Desember 2018” kata Ketua DPRD Provinsi Sumut, Wagirin Arman dalam acara diskusi publik yang digelar Forum Jurnalis Peduli Bank Sumut, di Medan, Kamis.

Dalam diskusi publik bertema ‘Mengoptimalkan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Bank Sumut Dalam Memajukan Perekonomian Rakyat Sumatera Utara’ tersebut, Wagirin mengemukakan bahwa realisasi penambahan modal Pemprov Sumut ke Bank Sumut efektif memperkuat daya saing perusahaan tersebut di industri perbankan dalam negeri.

Melalui realisasi penambahan penyertaan modal, kata dia, kepemilikan saham Pemprov Sumut di bank tersebut bisa segera meningkat hingga di atas 50 persen.

Pihaknya juga berharap Bank Sumut mempunyai daya saing tinggi sehingga mampu berperan nyata mendorong laju pertumbuhan ekonomi sekaligus berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kita berharap dengan penambahan penyertaan modal tersebut Bank Sumut dapat semakin ekspansif dan meningkatkan usaha yang bermanfaat bagi pembangunan daerah dan masyarakat Sumut,” kata Wagirin.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sumut M. Hanafiah Harahap berpendapat, keputusan mengenai besaran penambahan penyertaan modal Pemprov Sumut ke bank tersebut hendaknya direalisasikan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank Sumut sekitar Maret 2019.

“Penambahan modal Pemprov Sumut ke Bank Sumut hendaknya direalisasikan sebelum pelaksanaan Pemilihan Presiden pada April 2019,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, Gubernur Sumut selaku

pemegang saham pengendali harus memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan lambanya realisasi penambahan modal ke Bank Sumut.

Strategis

Pengamat Ekonomi Sumut Gunawan Benjamin menilai peran PT Bank Sumut dalam sistem perekonomian daerah sangat penting dan strategis, terutama sebagai penyeimbang kekuatan pasar atau industri keuangan serta turut berkontribusi dalam meningkatkan PAD.

Menurutnya, pelepasan sebagian saham ke publik melalui skema initial public offering atau IPO merupakan salah satu langkah penting yang harus segera dilakukan Bank Pembangunan Daerah Sumut untuk bisa lebih maju.

“Dengan modal di Bank Sumut yang semakin besar, maka kinerja bank itu semakin bagus. Keuntungan lainnya adalah bisa terbebasnya Bank Sumut dari kepentingan politik,” tuturnya.

Kepala Divisi Perencanaan PT Bank Sumut, Edy Riswan memaparkan, Bank Sumut sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) memiliki misi mengelola pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.

“Bank Sumut juga sangat memperhatikan soal penyertaan modal dan dalam menjalankan bisnis keuangan selalu menjaga rasio keuangan yang menjadi indikator,” katanya.

Disebutkannya, komposisi modal Pemprov Sumut di Bank Sumut saat ini masih sekitar 41,87 persen atau menurun dibanding posisi pada akhir 2016 sebesar 48,94 persen.

Sepanjang tahun 2018, Bank Sumut berhasil menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp701 miliar lebih atau melampaui target yang sebesar Rp 700 miliar.

Dari jumlah tersebut, kata Edy Riswan, sebanyak Rp1 triliun merupakan KUR ritel dan sisanya adalah KUR mikro.

Sebagai upaya memaksimalkan kinerja penyaluran KUR tahun 2019, kata dia, Bank Sumut tengah memaksimalkan penyaluran pada 135 unit kantor.

“Bank Sumut akan terus berbenah diri agar semakin maju sehingga bisa memberi manfaat besar juga pada masyarakat Sumut,” ucapnya.

(LMC-02)

Legislator Belum Solid Dukung Penyertaan Modal Bank Sumut



Ilustrasi – Karyawan PT Bank Sumut (Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 7/12 (LintasMedan) – Ranperda tentang penyertaan modal kepada PT Bank Sumut, masih menuai pro dan kontra di lingkungan DPRD Sumut.

Fraksi Hanura merupakan salah satu yang menolak Bank Sumut mendapat dana senilai Rp 24.268.280.639 Miliar berasal dari hibah MIF (Microfinance For Innovation Fund) sekaligus program bantuan ADB (Asian Development Bank) untuk korban paska Tsunami di Aceh dan Nias.

“Fraksi Hanura menolak Ranperda penambahan penyertaan modal kepada PT Bank Sumut tahun 2016 yang bersumber dari dana hibah pihak Asian Development Bank, dengan alasan belum ada kejelasan regulasi/aturan yang melatar belakangi keputusan tersebut,” kata jurubicara Hanura Eben Ejer Sitorus, pada paripurna pandangan umum fraksi tentang penambahan penyertaan modal ke PT Bank Pembangunan Daerah Sumut, Senin.

Apalagi, katanya, Fraksi Hanura sampai saat ini belum bisa memahami seutuhnya tentang mekanisme dan pendistribusian dana hibah tersebut. “Regulasi hibah masih abstrak dan kabur jadi jangan sampai melanggar aturan yang ada,” katanya.

Meski sebelumnya pengalokasian dana Rp24 Miliar lebih untuk penyertaan modal PT Bank Sumut menuai kritik berbagai kalangan, namun sejumlah fraksi lainnya menyetujui pembentukan Ranperda tersebut.

Fraksi PAN melalui juru bicaranya Aripay Tambunan menyatakan sumber dan mekanisme penambahan penyertaan modal dapat disetujui beserta jumlahnya.

“Sepanjang tetap pada koridor hukum dan memenuhi prinsip good governance,” ujarnya.

Fraksi PKS melalui juru bicaranya Basyir, juga menyatakan tidak membantah, hanya dengan catatan, peruntukan alokasi dana tersebut harus jelas serta fokus untuk mengembangkan jasa keuangan mikro melalui lima prinsip pokok.

“Jadi dipertanyakan sejauh mana kesiapan PT Bank Sumut atas 5 prinsip pokok tersebut,” katanya.

Begitu juga Fraksi PDIP , lewat juru bicaranya Efendi Napitupulu seraya berharap dana hibah bisa dikelola secara transparan.

Fraksi Partai Nasdem juga menyetujui hanya dengan catatan judul Ranperda harus ditambah sehingga tidak bersifat umum dan

seolah terkait dengan Perda sebelumnya.

“Jika Ranperda ini bersifat khusus maka judul yang ditetapkan juga harus khusus yaitu penambahan penyertaan modal ke dalam PT Bank Pembangunan Daerah Sumut dari Program Asian Development Bank (ADB),’ kata juru bicara Fraksi Nasdem, Anhar Monel.

Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan serta dihadiri Sekdaprov Sumut Hasban Ritonga.(LMC-02)